

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ASBTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
SKRIPSI	URGENSI PENGATURAN SISTEM... AUDI NAURA

1.4	Manfaat Penelitian	11
1.	Manfaat Teoritis	11
3.	Metode Penelitian	11
1.5.1	Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2	Tipe Pendekatan Masalah	12
1.5.3	Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	13
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	16
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II	KONSEP MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASIDALAM	
	PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.....	18
2.1	Tinjauan Umum Transaksi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia	
	18	
2.2	Transaksi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam Dinamika Hukum	
	Persaingan Usaha	26
2.3	Sistem Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia	33
BAB III	URGENSI PERUBAHAN SISTEM NOTIFIKASI MERGER,	
	AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI INDONESIA	54
3.1	Sistem Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Amerika Serikat	
	dan Filipina.....	54
SKRIPSI	URGENSI PENGATURAN SISTEM...	AUDI NAURA

3.2	Perbandingan Sistem <i>Pre-Merger Notification</i> dan <i>Post-Merger Notification</i>	76
BAB IV PENUTUP		97
4.1	Kesimpulan.....	97
4.2	Saran	98
DAFTAR BACAAN		100

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. *Clayton Antitrust Act (15 U.S § 18) of 1914.*
4. *Federal Trade Commission Act (15 U.S § 41-58) of 1914.*
5. *Federal Trade Commission, Federal Register 4984, Vol. 85, No. 18 of January 2020.*
6. *The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (15 U.S § 18a) of 1976.*
7. *Philippine Competition Act (Republic Act No. 10667) of 2015.*
8. *Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10667 (Philippine Competition Act) of 2016.*
9. *Philippine Competition Commission Momerandum Circular No. 18-001 regarding Amandment of Rule 4, Section 3 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10667.*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
11. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha.

12. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
13. Peraturan Komisi KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
14. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 9/KPPU/PDPT/IV/2013 tentang Penilaian Terhadap Peleburan Badan Usaha Mitsui-Soko Air Cargo Inc dengan TAS Express Co. Ltd.
2. Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 12/KPPU-Pat/III/2018 tentang Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Conocophilips Indonesia Inc. Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd.
3. Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 18/KPPU/PDPT/VII/2013 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Wyeth (Hongkong) Holding Company oleh Nestle S.A

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1. Putusan KPPU tentang Transaksi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Tahun 2019

GAMBAR

Gambar 1. Bagan Persetujuan Bersyarat